

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Berlakang

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Majene berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong pembangunan Kabupaten Majene untuk lima tahun kedepan tahun 2012-2016.

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene 2012-2016 adalah dokumen perencanaan Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2012-2016 dan bersifat indikatif.

Terkait dengan kewajiban satuan kerja perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 151 ayat 1 bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada

pasal 1 ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun”.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- g. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1240/II/Bangda/Tahun 2001, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota
- i. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012-2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah :

1. Menyediakan dokumen resmi perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;

2. Menyusun indikator keberhasilan antara visi misi dengan tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Majene dengan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam bidang Ketahanan Pangan dan P4K;
3. Sebagai acuan ,tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk merumuskan kebijakan dan program strategis dalam periode 2012 – 2016 dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sekaligus sebagai tolok ukur evaluasi kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Majene.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- BAB II Gambaran Pelayanan SKPD**, berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**, berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota,

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan,** berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan

BAB V **Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.** Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI **Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.** Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan dan P4K yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Kabupaten Majene, Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene mempunyai tugas pokok “Menyelenggarakan Kewenangan Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku“. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan Pelayanan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum;
- c. Pembinaan Terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- d. Pengadministrasian dan Pelaporan.

Adapun tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagai berikut:

1. Kepala Badan

a. Tugas Pokok;

Membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi;

Mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur manajemen SKPD bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi :

- Perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional, petunjuk teknis, pelaksanaan kewenangan bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertranian, perikanan dan kehutanan
- Pengorganisasian renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertranian, perikanan dan kehutanan,
- Pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertranian, perikanan dan kehutanan,
- Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka

panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertranian, perikanan dan kehutanan,

- Evaluasi pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertranian, perikanan dan kehutanan,
- Pelaporan hasil pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertranian, perikanan dan kehutanan,
- Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertranian, perikanan dan kehutanan,
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah.

2. Sekertaris

a. Tugas Pokok;

Membantu kepala badan melakukan koordinasi dan /atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan;

b. Fungsi;

Mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsure manajemen SKPD bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi :

- Bahan Penyusunan RKA, DPA dan Dokumen Perencanaan perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Pelaksanaan, Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi: bidang umum dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelayanan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala dan priodik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku kepada atasan
- Pemberian sarana dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

A. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

a. Tugas Pokok;

Membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan perencanaan, evaluasi dan melaporan

b. Fungsi;

Membantu sekretaris nelaksanakan tatalaksana urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yaitu :

- Pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- Menyusun Rencana Kerja (Renja), Renstra SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD Penetapan Kinerja, LAKIP, LPPD
- Pengumpulan, Pengolahan dan Pengkajian data bahan evaluasi dan pelaporan
- Penyusunan Laporan Hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok;

Membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan urusan rumah tangga dan kepegawaian

b. Fungsi;

Membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan rumah tangga dan kepegawaian yaitu :

- Penatausahaan surat menyurat, kegiatan pengadaan kebutuhan barang, perlengkapan dan tugas umum lainnya
- Administrasi kepegawaian, kearsipan dan protokol, perjalanan dinas;
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

C. Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok;

Membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan Keuangan

b. Fungsi;

Membantu sekretaris melaksanakan penatausahaan keuangan yaitu :

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan Anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang anggaran;
- Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran
- Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

a. Tugas Pokok;

Membantu kepala badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan pangan

b. Fungsi;

Membantu mengkoordinir dan/ atau memfasilitasi kegiatan bidang Ketahanan Pangan meliputi:

- Penyediaan, perumusan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- Perumusan, pengaturan serta koordinasi pengendali, pemantauan, penyediaan, pengadaan dan distribusi pangan, pengeluaran pangan yang bersifat strategis;

- Pengendali upaya pencegahan dan penanggulangan rawan pangan
- Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan petani dalam pemantapan ketersediaan pangan;
- Pelaksanaan pengembangan peran serta swasta dan masyarakat dalam penanggulangan rawan pangan
- Pelaksanaan pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional
- Pelaksanaan evaluasi ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan
- Pelaksanaan koordinasi penataan sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan;
- Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan
- Pelaksanaan dan pemanataan keamanan pangan
- Pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi mutu dan pangan gizi
- Pelaksanaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola konsumsi dan keamanan pangan;
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

A. Kepala Sub Distribusi, Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan

a. Tugas pokok

Membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpundan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang distribusi, ketersediaan dan kelembagaan pangan

b. Fungsi

Melaksanakan kegiatan dibidang distribusi, ketersediaan dan kelembagaan pangan meliputi:

- Perumusan, pengaturan serta koordinasi pengendalian, pemantauan, penyediaan, pengadaan dan distribusi pangan, pengeluaran pangan yang bersifat strategis;
- Pengendalian upaya pencegahan dan penanggulangan rawan pangan
- Pemberdayaan kelembagaan petani dalam pemantapan ketersediaan pangan
- Pengembangan peran serta swasta dan masyarakat dalam penanggulangan rawan pangan
- Pelaksanaan pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional
- Pelaksanaan evaluasi ketersediaan distribusi dan rawan pangan
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

B. Kepala Sub Penganekaragaman Konsumsi, Kewaspadaan pangandan Gizi

a. Tugas pokok

Membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpundan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang Penganekaragaman Konsumsi, Kewaspadaan pangandan Gizi

b. Fungsi

Melaksanakan kegiatan dibidang Penganekaragaman Konsumsi, Kewaspadaan pangandan Gizi meliputi:

- Pengkoordinasian penataan sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan;
- Pembinaan pengembangan panganekaragaman produk pangan;
- Pengkoordinasian dan pemantauan keamanan pangan (pencegahan kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia);
- Pengkoordinasian dan pemantauan serta evaluasi mutu pangan dan gizi;
- Penyuluhan kepada masyarakat tentang pola konsumsi dan keamanan pangan;
- Pengevaluasian panganekaragaman, konsumsi, kewaspadaan pangan dan gizi;
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh

a. Tugas Pokok;

Membantu kepala badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh

b. Fungsi;

Membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan dibidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan, meliputi:

- Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Pengembangan kelembagaan kelompok tani (Poktan dan Gapoktan);
- Peningkatan kepemimpinan kelembagaan petani dan nelayan
- Pengembangan ketenagaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan ketenagaan
- Pengembangan kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha
- Peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadayaan swasta melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan
- Pelaksanaan supervisi dan evaluasi kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;

- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri dari:

A. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan

a. Tugas Pokok;

Membantu kepala bidang dalam menyiapkan, mengimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan dibidang kelembagaan penyuluh

b. Fungsi;

Melaksanakan kegiatan dibidang kelembagaan penyuluh, meliputi:

- Penataan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPK) dan Pos penyuluh (Posluh)
- Pengembangan dan pembinaan BPPPK dan posluh
- Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani dan nelayan
- Peningkatan dan pengembangan kapasitas Poktan dan Gapoktan
- Penginventarisasian dan evaluasi kelembagaan Poktan dan Gapoktan
- Pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan Gapoktan dan Poktan

- Penyusunan database Profil Poktan dan Gapoktan
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

B. Kepala Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan

a. Tugas Pokok;

Membantu kepala bidang dalam menyiapkan, mengimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan dibidang Ketenagaan Penyuluhan

b. Fungsi;

Melaksanakan kegiatan dibidang Ketenagaan Penyuluhan, meliputi:

- Pengembangan Ketenagaan Penyuluh PNS, Swadaya dan swakarsa;
- Pengembangan penyelenggaraan pendidikan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Penguatan dan pengembangan pelatian tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
- Peningkatan mutu pelatihan pertanian, perikanan dan kehutanan
- Pengembangan Kerjasama tehnis dan jaringan kerja pelatihan pertanian, perikanan dan kehutanan
- Fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

5. Kepala bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

a. Tugas Pokok;

Membantu kepala badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang

b. Fungsi;

Membantu Mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan dibidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Penyuluhan meliputi:

- Penyusunan dan pelaksanaan sistem penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- Penyediaan dan penyusunan perencanaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- Perakitan media dan alat bantu penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten
- Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan
- Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan

- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Penyuluhan terdiri dari :

A. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

- a. Tugas Pokok;
Membantu kepala bidang dalam menyiapkan, mengimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Penyuluhan
- b. Fungsi;
Melaksanakan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Penyuluhan, meliputi:
 - Menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
 - Penyusunan programa penyuluhan Kabupaten, Kecamatan Desa/Kelurahan
 - Peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
 - Penyusunan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
 - Pelaksanaan sistem kerja LAKU (Latihan dan Kunjungan) disetiap BPPPK

- Penerapan metode penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- Penataan mekanisme penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- Penyebaran informasi dan teknologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

B. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan

a. Tugas Pokok;

Membantu kepala bidang dalam menyiapkan, mengimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan dibidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan

b. Fungsi;

Melaksanakan kegiatan dibidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan, meliputi:

- Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

- Pelaksanaan perakitan media dan alat bantu penyuluhan yang spesifik lokasi;
- Penginventarisasian sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

2.1.2 Struktur Organisasi

Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene, maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Majene, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ketahanan Pangan :
 - Sub Bidang Distribusi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan
 - Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Gizi
4. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan :
 - Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan

- Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan
5. Bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Penyuluhan :
 - Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan
 - Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan
 6. Unit Pelaksana Teknis (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) terdiri dari :
 - BP3K Kecamatan Banggae
 - BP3K Kecamatan Banggae Timur
 - BP3K Kecamatan Pamboang
 - BP3K Kecamatan Sendana
 - BP3K Kecamatan Tammerodo
 - BP3K Kecamatan Tubo
 - BP3K Kecamatan Malunda
 - BP3K Kecamatan Ulumanda
 7. Kelompok Jabatan Fungsional (Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan)

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Majene memiliki aparat berjumlah 93 orang yang terdiri dari:

❖ Kepala (Eselon II A)	1 Orang
❖ Sekertaris (Eselon III A)	1 Orang
❖ Kepala Bidang (Eselon III B)	3 Orang
❖ Kepala Sub Bidang (Eselon IV A)	9 Orang
❖ Staf PNS	25 Orang

❖ Penyuluh 62 Orang

Berdasarkan tingkat pendidikan formal atau pendidikan terahir yang telah ditamatkan adalah sebagai berikut:

❖ Pasca Sarjana (S2) 6 Orang

❖ S1 46 Orang

❖ D3 7 Orang

❖ SLTA 30 Orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana/Asset

Sarana dan prasarana pendukung pekerjaan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan cukup memadai, seperti gedung perkantoran, peralatan Komputer lengkap dengan asesorisnya, serta peralatan multimedia lainnya, meja, kursi, lemari arsip. Kendaraan dinas roda 2 cukup mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Adapun rincian sarana yang tersedia di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Asal / Cara Perolehan Barang	Ukuran Barang / Kostruksi (PSD)	Satuan	Keadaan Barang	Jumlah Barang	Ket
1	Tanah bangunan kantor	APBN	2,200	M ²		1	Kantor BPP Banggae Timur
2	Tanah bangunan kantor		975	M ²		1	Rumah Jaga BPP Banggae Timur
3	Tanah bangunan kantor	Pemda	172	M ²		1	Kantor BPP Banggae
4	Tanah bangunan kantor	Pemda	173	M ²		1	Kantor BPP Pamboang
5	Tanah bangunan kantor	Pemda	2,572	M ²		1	Kantor BPP Sendana
6	Tanah bangunan kantor		975	M ²		1	Rumah Jaga BPP Sendana
7	Tanah bangunan kantor	Pemda	1,800	M ²		1	Kantor BPP Tammero'do Sendana
8	Tanah bangunan kantor	Pemda	1,008	M ²		1	Kantor BPP Tubo Sendana
9	Tanah bangunan kantor	Pemda	2,572	M ²		1	Kantor BPP Malunda
10	Tanah bangunan kantor	Pemda	2,572	M ²		1	Kantor BPP Ulumanda
11	Sepeda Motor	APBN/APBD		Unit	B	79	
12	Mesin ketik	APBD		Unit	B	10	
13	Komputer PC	APBD		Buah	B	13	
14	Infocus	APBD		Buah	B	3	
15	Laptop	APBD		Unit	B	14	
16	Printer	APBD		Unit	B	5	
17	Wirelles	APBD		Unit	B	10	
18	Megaphone	DAK		Buah	B	4	
19	Papan Potensi	DAK		Buah	B	3	
20	Camera digital	APBD		Buah	B	2	
21	Kantor BPP	Pemda	171	M ²	B	1	BPP Banggae Timur
22	Rumah Dinas	Pemda	42	M ²	B	1	BPP Banggae Timur
23	Rumah Dinas	Pemda	36	M ²	B	1	BPP Banggae Timur
24	Kantor BPP	Pemda	206	M ²	B	1	BPP Banggae
25	Kantor BPP	Pemda	84	M ²	B	1	BPP Pamboang
26	Rumah Dinas	Pemda	48	M ²	B	1	BPP Pamboang
27	Kantor BPP	Pemda	120	M ²	B	1	BPP Sendana
28	Kantor BPP	Pemda	124	M ²	B	1	BPP Tammero'do Sendana
29	Gudang	Pemda	45	M ²	B	1	BPP Tammero'do Sendana
30	Rumah Dinas	Pemda	60	M ²	B	1	BPP Tammero'do Sendana
31	Kantor BPP	Pemda	190	M ²	B	1	BPP Tubo Sendana
32	Kantor BPP	Pemda	189	M ²	B	1	BPP Malunda
33	Kantor BPP	Pemda	200	M ²	B	1	BPP Ulumanda

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan P4K

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis									-	-	100.0	100.0	-					
2	Meningkatnya kemampuan lembaga petani									-	-	100.0	100.0	8 Kec					
3	Meningkatnya sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani									-	-	100.0	0.0	-					
4	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur									-	-	100.0	0.0	-					
5	Terlaksananya pengembangan usaha agribisnis pedesaan (DP PUAP)									-	-	100.0	0.0	-					
6	Terlaksananya analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan									-	-	100.0	100.0	1 Kali					
7	Terlaksananya analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan									-	-	100.0	100.0	1 Kali					
8	Tersusunnya Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah									-	-	100.0	100.0	12 Lap					
9	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan									-	-	100.0	100.0	8 Klp					
10	Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat									-	-	100.0	0.0	-					
11	Terlaksananya pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok									-	-	100.0	100.0	12 Kali					
12	Tercapainya pengembangan cadangan pangan daerah									-	-	100.0	100.0	3 Ha					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Tercapainya Pengembangan desa mandiri pangan									-	-	100.0	100.0	-					
14	Tercapainya pengembangan lumbung pangan desa									-	-	100.0	60.0	-					
15	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan											100.0	0.0	-					
16	Terlaksananya koordinasi kebijakan perberasan kabupaten									-	-	100.0	75.0	1 Kali					
17	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk pangan									-	-	100.0	0.0	-					
18	Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif									-	-	100.0	50.0	1 Kali					
19	Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna									-	-	100.0	98.0	-					
20	Terlaksananya pelatihan pengendalian hama terpadu (PHT)									-	-	100.0	100.0	-					
21	Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan									-	-	100.0	100.0	192 Kali					
22	Terlaksananya supervisi dan pembinaan penyuluh									-	-	0.0	100.0	210 Kali					
23	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh									-	-	0.0	100.0	2 Kali					
24	Terlaksananya operasional penyuluh									-	-	0.0	100.0	1 Thn					
25	Meningkatnya kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan									-	-	100.0	0.0	-					
26	Terlaksananya penilaian penyuluh dan petani berprestasi									-	-	100.0	100.0	1 Kali					
27	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan									-	-	0.0	100.0	-					
28	Tercapainya penyusunan program penyuluhan									-	-	0.0	100.0	9 Kali					
29	Terlaksananya penyusunan dan penyebaran informasi pertanian									-	-	0.0	100.0	3 Klp					

1	2	3	4	5						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30	Terlaksananya temu teknis penyuluh pertanian									-	-	100.0	0.0	-					
31	Terlaksananya diklat penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan									-	-	100.0	0.0	-					
32	Meningkatnya sumber daya penyuluh swadaya									-	-	90.0	90.0	-					

Dari Tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesenjangan/gap pelayanan karena hasil yang dicapai pada periode Renstra sebelumnya yaitu tahun 2009-2011 rata-rata mencapai 90% sampai 100% pencapaian kinerjanya.

Dilihat dari target dan realisasi Renstra periode sebelumnya, diketahui bahwa indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene disetiap pelayanan rata-rata telah tercapai dengan baik yaitu 90%-100% sesuai indikator kinerja, antara lain:

1. Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2. Meningkatnya kemampuan lembaga petani
3. Meningkatnya sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
4. Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
5. Terlaksananya pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PD PUAP)
6. Terlaksananya analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

7. Terlaksananya analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
8. Tersusunnya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
9. Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
10. Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
11. Terlaksananya pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
12. Tercapainya pengembangan cadangan pangan daerah
13. Tercapainya pengembangan desa mandiri pangan
14. Meningkatnya mutu dan keamanan pangan
15. Meningkatnya produksi, produktifitas dan mutu produk pangan
16. Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
17. Terlaksananya pelatihan pengendalian hama terpadu (PHT)
18. Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
19. Terlaksananya supervisi dan pembinaan penyuluh
20. Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh
21. Terlaksananya operasional penyuluh
22. Meningkatnya kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
23. Terlaksananya penilaian penyuluh dan petani berprestasi
24. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan
25. Tercapainya penyusunan program penyuluhan
26. Terlaksananya penyusunan dan penyebaran informasi pertanian
27. Terlaksananya temu teknis penyuluh pertanian
28. Terlaksananya diklat penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
29. Meningkatnya sumber daya penyuluh swadaya

Dilihat dari tercapainya pelayanan diatas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut, antara lain:

1. Tersedianya sumberdaya manusia/aparatur yang memadai
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
3. Tersedianya anggaran
4. Tersedianya Kelompok tani/Gapoktan

Dari tabel 2.1 diatas, juga dapat diketahui pelayanan yang mana saja target belum tercapai atau kurang tercapai. Dari periode Renstra sebelumnya tahun 2009-2011 ada beberapa indikator kinerja yang yang tidak mencapai 100%, antara lain:

1. Tercapainya pengembangan lumbung pangan desa
2. Terlaksananya koordinasi kebijakan perberasan kabupaten
3. Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif

Dilihat dari tercapainya pelayanan diatas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut, antara lain:

1. Adanya kesenjangan antara produksi pertanian dengan potensi yang dimiliki
2. Belum efektifnya keberadaan penyuluh dalam membina petani untuk meningkatkan produksi petani
3. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani
4. Aksesibilitas petani Petani dan pelaku agribisnis lainnya terhadap layanan usaha masih sangat terbatas
5. Belum efektifnya penerapan teknologi tepat guna di tingkat petani dalam pemanfaatan seluruh hasil pertanian secara komprehensif
6. Pengetahuan dan keterampilan penyuluh belum sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK)

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan P4K

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	750,000	600,000	350,000	-	-	750,000	600,000	348,000	-	-	100.0	100.0	99.4	100,000	98,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	20,800,000	23,500,000	22,200,000	-	-	18,453,087	22,090,334	19,245,487	-	-	88.7	94.0	86.7	15,266,667	13,094,458
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	-	-	0	0	350,000	-	-	0	0	350,000	-	-	0.0	0.0	100.0	350,000	350,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	12,600,000	12,600,000	12,600,000	-	-	12,600,000	12,600,000	12,600,000	-	-	100.0	100.0	100.0	8,400,000	8,400,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	5,000,000	5,000,000	4,650,000	-	-	5,000,000	5,000,000	4,650,000	-	-	100.0	100.0	100.0	2,983,333	2,983,333
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	-	4,100,000	7,395,000	5,030,000	-	-	4,100,000	7,395,000	4,430,000	-	-	100.0	100.0	88.1	3,663,333	3,063,333
Penyediaan alat tulis kantor	-	-	17,400,000	21,900,000	19,560,000	-	-	17,400,000	21,900,000	19,560,000	-	-	100.0	100.0	100.0	13,760,000	13,760,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	12,102,400	10,640,000	7,600,000	-	-	12,102,400	10,640,000	7,600,000	-	-	100.0	100.0	100.0	3,565,867	3,565,867
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	3,000,000	6,232,750	1,253,120	-	-	3,000,000	6,232,750	1,253,000	-	-	100.0	100.0	100.0	253,120	253,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	31,500,000	13,075,000	26,600,000	-	-	31,500,000	13,075,000	26,600,000	-	-	100.0	100.0	100.0	16,100,000	16,100,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	19,060,000	5,400,000	7,800,000	-	-	18,880,000	5,240,000	7,800,000	-	-	99.1	97.0	100.0	1,446,667	1,506,667
Penyediaan makanan dan minuman	-	-	26,750,000	22,000,000	14,000,000	-	-	26,750,000	21,990,000	13,996,000	-	-	100.0	100.0	100.0	5,083,333	5,079,333
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	65,000,000	64,880,000	53,420,000	-	-	65,000,000	64,565,000	52,660,000	-	-	100.0	99.5	98.6	31,753,333	30,993,333
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	-	-	36,050,000	30,100,000	0	-	-	31,850,000	30,100,000	0	-	-	88.3	100.0	0.0	(12,016,667)	(10,616,667)
Penyediaan jasa pengaman kantor	-	-	0	4,200,000	4,200,000	-	-	0	4,200,000	4,200,000	-	-	0.0	100.0	100.0	4,200,000	4,200,000

1	2	3	4	5	6	2	3	9	10	11	2	3	14	15	16	17	18
Pengadaan Mebeleur	-	-	0	23,750,000	0	-	-	0	23,750,000	0	-	-	0.0	100.0	0.0	0	0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	43,444,350	15,000,000	5,000,000	-	-	43,442,363	15,000,000	5,000,000	-	-	100.0	100.0	100.0	(9,481,450)	(9,480,788)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	28,450,000	29,419,000	29,069,000	-	-	28,448,013	29,413,000	29,048,000	-	-	100.0	100.0	99.9	19,585,667	19,565,329
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	28,125,000	0	0	-	-	28,125,000	0	0	-	-	100.0	0.0	0.0	(9,375,000)	(9,375,000)
Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	35,000,000	15,000,000	10,000,000	-	-	35,000,000	13,500,000	10,000,000	-	-	100.0	90.0	100.0	(1,666,667)	(1,666,667)
Penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar realisasi	-	-	6,800,000	9,520,000	7,600,000	-	-	6,800,000	9,520,000	7,600,000	-	-	100.0	100.0	100.0	5,333,333	5,333,333
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-	5,065,000	5,640,000	4,140,000	-	-	5,062,000	5,634,000	4,140,000	-	-	99.9	99.9	100.0	2,451,667	2,452,667
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	-	-	10,960,000	10,375,000	8,375,000	-	-	10,807,500	10,365,000	8,375,000	-	-	98.6	99.9	100.0	4,721,667	4,772,500
Monitoring pengendalian dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD	-	-	0	5,410,000	3,810,000	-	-	0	5,407,000	3,810,000	-	-	0.0	99.9	100.0	3,810,000	3,810,000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	-	-	14,257,000	14,257,000	0	-	-	14,257,000	14,257,000	0	-	-	100.0	100.0	0.0	(4,752,333)	(4,752,333)
Peningkatan kemampuan lembaga petani	-	-	8,260,000	12,500,000	57,500,000	-	-	8,260,000	12,500,000	57,334,999	-	-	100.0	100.0	99.7	54,746,667	54,581,666
Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	-	-	8,316,500	0	0	-	-	8,316,500	0	0	-	-	100.0	0.0	0.0	(2,772,167)	(2,772,167)
Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	-	-	25,232,500	0	0	-	-	25,232,500	0	0	-	-	100.0	0.0	0.0	(8,410,833)	(8,410,833)
Terlaksananya pengembangan usaha agribisnis pedesaan (DP PUAP)	-	-	50,000,000	0	0	-	-	50,000,000	0	0	-	-	100.0	0.0	0.0	(16,666,667)	(16,666,667)
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	-	-	10,700,000	10,700,000	6,745,000	-	-	10,005,000	10,090,000	6,350,000	-	-	93.5	94.3	94.1	3,178,333	3,015,000
Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	-	-	9,327,500	8,830,000	5,100,000	-	-	8,377,300	8,325,000	3,940,000	-	-	89.8	94.3	77.3	1,990,833	1,147,567
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	-	-	14,150,000	11,650,000	6,100,000	-	-	13,350,000	10,640,000	4,750,000	-	-	94.3	91.3	77.9	1,383,333	300,000

1	2	3	4	5	6	2	3	9	10	11	2	3	14	15	16	17	18
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	-	-	21,300,000	21,300,000	9,455,000	-	-	21,300,000	21,280,000	9,455,000	-	-	100.0	99.9	100.0	2,355,000	2,355,000
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	-	-	19,525,000	0	0	-	-	19,299,750	0	0	-	-	98.8	0.0	0.0	(6,508,333)	(6,433,250)
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	-	-	11,675,000	11,675,000	5,800,000	-	-	11,675,000	10,550,000	5,800,000	-	-	100.0	90.4	100.0	1,908,333	1,908,333
Pengembangan cadangan pangan daerah	-	-	44,718,000	41,480,000	14,500,000	-	-	43,188,000	40,770,000	14,135,000	-	-	96.6	98.3	97.5	(406,000)	(261,000)
Pengembangan desa mandiri pangan	-	-	57,740,000	61,250,000	0	-	-	55,755,000	58,350,000	0	-	-	96.6	95.3	0.0	(19,246,667)	(18,585,000)
Pengembangan lumbung pangan desa	-	-	21,570,000	19,570,000	0	-	-	20,930,000	10,020,000	0	-	-	97.0	51.2	0.0	(7,190,000)	(6,976,667)
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	-	-	31,195,000	0	0	-	-	30,610,000	0	0	-	-	98.1	0.0	0.0	(10,398,333)	(10,203,333)
Koordinasi kebijakan perberasan kabupaten	-	-	31,000,000	31,000,000	20,850,000	-	-	26,980,000	23,287,500	13,950,000	-	-	87.0	0.0	66.9	10,516,667	4,956,667
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pangan	-	-	18,042,500	0	0	-	-	18,042,500	0	0	-	-	100.0	0.0	0.0	(6,014,167)	(6,014,167)
Penyuluhan sumber pangan alternatif	-	-	85,499,500	88,737,500	14,846,000	-	-	83,549,500	40,200,000	14,846,000	-	-	97.7	45.3	100.0	(13,653,833)	(13,003,833)
Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	-	-	42,965,800	47,450,000	0	-	-	42,340,800	46,500,000	0	-	-	98.5	98.0	0.0	(14,321,933)	(14,113,600)
Pelatihan pengendalian hama terpadu (PHT)	-	-	22,730,000	68,250,000	0	-	-	22,729,900	68,233,000	0	-	-	100.0	100.0	0.0	(7,576,667)	(7,576,633)
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	-	-	19,035,000	27,857,000	22,338,000	-	-	19,035,000	26,147,000	21,978,000	-	-	100.0	93.9	98.4	15,993,000	15,633,000
Supervisi dan pembinaan penyuluh	-	-	0	36,600,000	12,715,000	-	-	0	30,067,750	12,710,000	-	-	0.0	82.2	100.0	12,715,000	12,710,000
Penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh	-	-	0	8,180,000	4,200,000	-	-	0	8,175,000	4,200,000	-	-	0.0	99.9	100.0	4,200,000	4,200,000
Operasional penyuluh	-	-	0	130,325,000	22,200,000	-	-	0	130,185,000	21,885,000	-	-	0.0	99.9	98.6	22,200,000	21,885,000
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	-	-	140,940,000	0	0	-	-	138,687,500	0	0	-	-	98.4	0.0	0.0	(46,980,000)	(46,229,167)
Penilaian penyuluh dan petani berprestasi	-	-	25,550,000	22,562,800	22,157,000	-	-	25,550,000	21,387,000	22,057,000	-	-	100.0	94.8	99.5	13,640,333	13,540,333

1	2	3	4	5	6	2	3	9	10	11	2	3	14	15	16	17	18
Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan	-	-	0	62,000,000	0	-	-	0	61,404,000	0	-	-	0.0	99.0	0.0	0	0
Penyusunan program penyuluhan	-	-	0	45,000,000	223,425,000	-	-	0	41,955,000	223,414,500	-	-	0.0	93.2	100.0	223,425,000	223,414,500
Penyusunan dan penyebaran informasi pertanian	-	-	0	37,500,000	48,144,400	-	-	0	37,371,500	48,142,700	-	-	0.0	99.7	100.0	48,144,400	48,142,700
Temu teknis penyuluh pertanian	-	-	46,325,000	0	0	-	-	46,325,000	0	0	-	-	100.0	0.0	0.0	(15,441,667)	(15,441,667)
Diklat penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	-	-	84,000,000	0	0	-	-	83,850,000	0	0	-	-	99.8	0.0	0.0	(28,000,000)	(27,950,000)

Dari tabel 2.2 diatas, dapat dilihat bahwa dari periode Renstra sebelumnya mulai tahun 2009 sampai 2011 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik, dibuktikan dengan pencapaian rata-rata ratio pada tahun 2009 mencapai 78,56%, tahun 2010 mencapai 74,57% dan pada tahun 2011 rata-rata mencapai 62,29%. Tentu saja ini belum sesuai dengan harapan karena masih ada beberapa item pendanaan pelayanan yang belum mencapai ratio 100%. Diharapkan ditahun-tahun mendatang, ratio antara realisasi dan anggaran dapat tercapai 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan pada Badan Ketahanan Pangan dan P4K, antara lain:

1. Prosedur/mechanisme dalam pengelolaan pendanaan belum berjalan dengan baik
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene masih rendah

3. Progres pelaksanaan program terkadang belum berjalan sesuai Renstra dan Renja yang ditetapkan setiap tahun
4. Program dan kegiatan yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai dengan perencanaan karena tergantung dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemda kepada Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan P4K

2.4.1 Analisis terhadap Renstra Kementerian Badan Ketahanan Pangan

Tabel 2.3
Komparansi Capaian Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene terhadap Sasaran Renstra Prop dan Renstra Kementerian

No	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra Badan	Sasaran pada Renstra Prop	Sasaran pada Renstra K/L
1	Tersusunnya analisis pola konsumsi dan suplai pangan	1 paket		436 Kab.
2	Terlaksananya analisis kebutuhan pangan	1 paket		436 Kab.
3	Terlaksananya penyusunan laporan bulanan kondisi ketahanan pangan	12 bulan		436 Kab.
4	Terlaksananya pemanfaatan pekaratan untuk pengembangan pangan	8 paket		-
5	Terlaksananya pemantauan harga pangan pokok	1 paket		-
6	Terlaksananya penanaman uwi sebagai cadangan pangan daerah	6 ha		-
7	Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan	7 desa		-
8	Terlaksananya pembinaan lumbung pangan	5 unit		-
9	Terlaksananya rapat koordinasi dewan ketahanan pangan (DKP)	1 kali/thn		-
10	Terlaksananya demonstrasi pengolahan pangan lokal	1 paket		-
11	Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	8 kec		-
12	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan pangan	8 kec		-
13	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	6 desa		-

14	Terlaksananya pelatihan ketahanan pangan	1 paket		-
15	Terlaksananya kapasitas tenaga penyuluh	192 kali/95 org		-
16	Terlaksananya supervisi dan pembinaan6 penyuluh	1 thn		-
17	Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh	2 kali/55 org		-
18	Terlaksananya penilaian penyuluh dan petani	1 kali/24 org		-
19	Tersedianya sarana penyuluhan	9 paket/8 kec dan kab		-
20	Terlaksananya penyusunan program	9 kali/8 kec dan kab		-
21	Tersusunnya informasi pertanian	5 judul		-
22	Terlaksananya jadwal kunjungan ke kelompok tani	384 kali 642 klp		-
23	Terlaksananya pendampingan penyusunan RDK/RDKK	747 klp		-
24	Terlaksananya pelatihan penyuluh swadaya	30 org		-
25	Tersedianya dana operasional penyuluh THL-TBPP	4 bln/40 org		-
26	Terlaksananya penerapan teknologi	8 kec		-
27	Terlaksananya pelatihan SL-PHT	8 klp		-
28	Terlaksananya pertemuan aplikasi teknologi	1 kali		-
29	Terlaksananya mimbar seresehan	1 kali		-
30	Terlaksananya kursus tani	8 kali		-
31	Terlaksananya pendataan dan penilaian kemampuan petani	240 org 8 kec		-
32	Terlaksananya sosialisasi poslulh desa	10 desa/kel		-
33	Tersedianya sarana prasarana poslulh desa	10 poslulh		-

Dari tabel 2.3 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Renstra Badan telah melebihi sasaran Renstra Kementerian, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Ketahanan Pangan dan P4K dikatakan telah baik secara Nasional.

Adapun isu-isu strategis didalam Renstra Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan bahan baku industri.
 - a. meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi, antara lain benih/bibit, pupuk, pakan, lahan, kapal, alat mesin, dan sarana tangkap termasuk kebijakan subsidi yang lebih efisien;
 - b. meningkatkan dukungan penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknologi terapan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - c. meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman, peningkatan kesehatan hewan/ikan, dan pengembangan sistem perkarantinaan
 - d. mendorong investasi pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri perdesaan yang berbasis produk lokal;
 - e. mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara luas ke non pertanian serta konservasi sumber daya lahan dan air;
 - f. memperluas areal lahan pertanian dan perikanan baru serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah, dan lahan terlantar, termasuk lahan untuk pembudidayaan ikan dan perluasan wilayah tangkapan nelayan nasional ke ZEEI dan laut lepas;

- g. membenahi, menata, dan mengharmonisasikan peraturan perundangan untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta untuk meningkatkan penguasaan lahan oleh petani/ nelayan/ pembudidaya ikan;
 - h. mengembangkan infrastruktur pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan seperti jalan produksi/usahatani, jalan desa, pencetakan sawah, jaringan irigasi, saluran tambak, tata air mikro, pelabuhan perikanan, dan infrastruktur perdesaan lainnya seperti transportasi, listrik, dan alat komunikasi; dan
 - i. mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
2. Peningkatan efisiensi distribusi pangan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau.
- a. meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga;
 - b. mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor untuk mendukung ketahanan pangan;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan agar lebih efisien dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan;
 - d. mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat memperlancar dan mengefisienkan distribusi pangan antar daerah/wilayah; serta
 - e. mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan yang berbasis bahan pangan lokal.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan menjadi kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang perlu memperoleh

perhatian yang memadai agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan.

- a. Mengembangkan penganekaragaman (diversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. meningkatkan konsumsi ikan dan diversifikasi produk perikanan;
- c. meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan bantuan pangan;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan cadangan pangan;
- e. meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pangan yang bergizi dan seimbang serta pola hidup sehat, terutama untuk memperbaiki status gizi ibu hamil dan anak balita;
- f. mengembangkan penelitian pangan dan gizi, serta industri pangan lokal;
- g. mengembangkan sistem mutu, kehalalan, dan keamanan pangan, termasuk pengendalian risiko penyakit zoonosis;
- h. meningkatkan pencegahan dan penanganan keadaan rawan pangan dan gizi karena keterbatasan akses, akibat adanya bencana alam dan bencana sosial;
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan/subsidi pangan kepada golongan masyarakat tertentu (masyarakat miskin, ibu hamil, balita gizi buruk);
- j. mengembangkan jaringan antarlembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; serta
- k. meningkatkan efektivitas fungsi lembaga ketahanan pangan dan gizi, baik di pusat maupun daerah.

4. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.
 - a. meningkatkan mutu produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta efisiensi produksi;
 - b. mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta jasa pendukungnya;
 - c. membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran serta manajemen logistik dalam menjaga kesinambungan pasokan produk;
 - d. mengembangkan sentra usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan secara terpadu;
 - e. mengembangkan kebijakan perdagangan internasional yang mendukung peningkatan daya saing nasional;
 - f. mengembangkan kebijakan perdagangan internasional dan peningkatan upaya diplomasi ke negara-negara pengimpor produk;
 - g. meningkatkan pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.
5. Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan.
 - a. meningkatkan pengetahuan petani/petani hutan/nelayan/ petambak agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani/ petani hutan/nelayan/ petambak;
 - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - d. mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diseminasinya kepada petani/nelayan/petambak;

- e. merumuskan kebijakan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mendukung petani/petani hutan/ nelayan/petambak;
- f. mengembangkan sistem data dan informasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang integratif dan mudah diakses oleh petani/nelayan/ pembudidaya ikan;
- g. meningkatkan kemampuan/keterampilan serta penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan; dan
- h. memfasilitasi dan mendorong pengembangan kelembagaan pembiayaan bagi masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terjangkau.

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tujuan

Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

1. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat;
4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;

5. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

Sasaran

Sasaran makro yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2010-2014 berdasarkan visi, misi dan tujuan, meliputi:

1. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
2. Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1% setiap tahun;
3. Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari;
4. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;
5. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
6. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen;
7. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Kebijakan Umum

1. Meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat secara luas;

2. Mewujudkan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; peningkatan pendapatan petani; dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kebijakan Strategis

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan bahan baku industri.
2. Peningkatan efisiensi distribusi pangan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan menjadi kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang perlu memperoleh perhatian yang memadai agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan.
4. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.
5. Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan P4K

Adapun permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara produksi pertanian dengan potensi yang dimiliki
2. Belum efektifnya keberadaan penyuluh dalam membina petani untuk meningkatkan produksi petani
3. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani
4. Aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis lainnya terhadap layanan usaha masih sangat terbatas
5. Belum efektifnya penerapan teknologi tepat guna di tingkat petani dalam pemanfaatan seluruh hasil pertanian secara komprehensif
6. Pengetahuan dan keterampilan penyuluh belum sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK)
7. Prosedur/mekanisme dalam pengelolaan pendanaan belum berjalan dengan baik
8. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene masih rendah
9. Progres pelaksanaan program terkadang belum berjalan sesuai Renstra dan Renja yang ditetapkan setiap tahun

10. Program dan kegiatan yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai dengan perencanaan karena tergantung dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemda kepada Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: 'TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DI KABUPATEN MAJENE DALAM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN AGAMIS DAN BERBUDAYA'

No	Misi dan Program KDH dan wakil KDH	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1.....Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dan aparatur pemerintahan	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Penyuluh	Belum efektifnya keberadaan penyuluh dalam membina petani untuk meningkatkan produksi petani	adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan
	Program ...Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan			
2	Misi 2 ...Peningkatan Akselerasi Pembangunan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Politik dan Keamanan	Belum efektifnya penerapan teknologi tepat guna di tingkat petani dalam	- Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan	Adanya program revitalisasi pertanian, perikanan

		pemangsaan seluruh hasil pertanian secara komprehensif	petani - Aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis lainnya terhadap layanan usaha masih sangat terbatas	dan keketahanan
	Program...Peningkatan kesejahteraan petani			
3	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam	- belum terwujudnya ketahanan pangan daerah - belum terealisasinya cadangan pangan daerah (sumber pangan alternatif)	adanya kesenjangan antara produksi pertanian dengan potensi yang ada	Tersedianya kelompok tani dan penyuluh di masing-masing Kecamatan yang ada untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah
	Program... Peningkatan Ketahanan pangan pertanian/perkebunan			

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan dan P4K karena dampaknya yang signifikan bagi pelaksanaan program di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting / keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu

isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis Badan Ketahanan Pangan dan P4K adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pada Badan Ketahanan Pangan dan P4K. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dapat dirumuskan Isu strategis dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene Periode 2012-2016 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Isu strategis Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan P4K
Kabupaten Majene

No	Program	Permasalahan	Isu
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terwujudnya ketahanan pangan daerah • Pengembangan Desa Mandiri Pangan belum terealisasi di 8 kecamatan yang ada di Kab. Majene • Belum terealisasinya cadangan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan potensi pertanian, perikanan dan kehutanan

2.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	<p>daerah (sumber pangan alternative)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya penerapan teknologi tepat guna di tingkat petani dalam pemanfaatan seluruh hasil pertanian secara komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan secara komprehensif
3.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perikanan dan Kehutanan Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya keberadaan penyuluh dalam membina petani untuk meningkatkan produksi petani • Kurangnya tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di Kab. Majene • Pengetahuan dan keterampilan penyuluh belum sesuai dengan standar kompetensi kerja (SKK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM kurang • Kuantitas SDM belum memadai

Berdasarkan permasalahan per program di atas, maka ditetapkan isu-isu strategis pelayanan pada Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Majene, yaitu :

1. Pengembangan potensi pertanian, perikanan dan kehutanan
2. Penerapan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan secara komprehensif
3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Majene adalah :

***“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG HANDAL DALAM RANGKA
PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MAJENE”***

Untuk tercapainya Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi yang bersinergi dengan instansi terkait;
2. Meningkatkan koordinasi.
3. dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan daerah;
3. Meningkatkan pembinaan pemantapan kelembagaan ketahanan pangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencapaian kemandirian pangan;

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan program Badan Ketahanan Pangan dan P4K selama periode lima tahun ke depan untuk memberikan arahan

terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan dalam bentuk program-program dan kegiatan. Adapun tujuan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam kurun waktu 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
2. Meningkatkan pembinaan pemantapan kelembagaan ketahanan pangan;
3. Meningkatkan sistem penyuluhan dan Sumberdaya Pertanian;

4.2.2. Sasaran

Selaras dengan Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam lima tahun kedepan dirumuskan sasaran yang ingin dicapai meliputi:

1. Tersusunnya kebijakan ketahanan pangan
2. Terwujudnya percepatan diversifikasi keragaman pangan, keamanan pangan yang berbasis pangan lokal
3. Meningkatnya kemampuan dan kualitas pelaku utama dan usaha
4. Meningkatkan kinerja penyuluhan
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan
6. Meningkatnya profesionalisme penyuluh
7. Peningkatan produksi pertanian / perkebunan
8. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani
9. Meningkatnya ekonomi masyarakat nelayan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan	Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan	Tersedianya laporan kondisi ketahanan pangan daerah	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap
2			Tersedianya data pemantauan dan analisis harga pangan pokok	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap
3			Tersedianya data hasil analisis kebutuhan pangan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
4			Tersusunnya laporan NBM dan PPH	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
5			Laporan hasil rapat koordinasi dewan ketahanan pangan (DKP)	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
6			Terbinanya kelompok lumbung pangan desa	-	5 klp	6 klp	6 klp	8 klp
7		Penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan	Terbinanya kelompok pengembangan tanaman uwi (lame) sebagai pangan lokal	-	1 klp	2 klp	2 klp	2 klp
8			Terbinanya kelompok / KWT dalam pemanfaatan pekarangan	2 klp	4 klp	5 klp	6 klp	8 klp
9			Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan kelompok dalam pengolahan pangan lokal	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
10			Pembinaan dan pengembangan desa mandiri pangan	-	14 desa	16 desa	18 desa	20 desa
11			Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	1 desa	2 desa	3 desa	4 desa	5 desa
12			Laporan data pemantauan mutu dan keamanan pangan	-	8 kec	8 kec	8 kec	8 kec
13	Meningkatkan pembinaan pemantapan kelembagaan petani / nelayan	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pelaku utama dan usaha	Meningkatnya kualitas lembaga petani	10%	20%	30%	40%	50%
14			Meningkatkan peran serta petani, mengembangkan kerja sama, dapat memecahkan masalah, mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lain	-	10%	20%	30%	40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15			Tercapainya pemberdayaan kelompok nelayan melalui pengembangan perikanan budidaya tambak/payau	-	2 Ha	3 Ha	4 Ha	5 Ha
16			Tercapainya pemberdayaan kelompok nelayan melalui pengembangan perikanan budidaya kolam air tawar	-	1 Ha	2 Ha	3 Ha	4 Ha
17			Tercapainya pemberdayaan kelompok nelayan melalui pengembangan perikanan budidaya laut dengan sistem keramba jaring apung (KJA) dan kurungan tangkap (KURCAP)	-	2 unit	4 unit	5 unit	6 unit
18			Tercapainya pemberdayaan kelompok nelayan melalui pelatihan dan temu lapang	-	3 klp	4 klp	5 klp	6 klp
19	Meningkatkan sistem penyuluhan dan sumberdaya pertanian	Meningkatnya kinerja penyuluhan	Terlaksananya program penyuluhan kabupaten dan kecamatan	9 Keg	9 Keg	9 Keg	9 Keg	9 Keg
20			Tersedianya laporan kegiatan penyuluhan	90 Org	95 Org	95 Org	95 Org	95 Org
21		Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan	Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluhan	-	8 BPP	8 BPP	8 BPP	8 BPP
22		Meningkatkan profesionalisme penyuluh	Terlaksananya Penas XIII	-	-	-	25 org	-
23			Terlatihnya penyuluh swadaya	-	30 org	40 org	50 org	60 org
24		Peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Meningkatnya sistim insentif dan disinsentif bagi petani / kelompok tani	4 kec	5 kec	5 kec	5 kec	5 kec
25		Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani	Peningkatan pengendalian hama terpadu (SLPHT) padi	-	4 kec	6 kec	6 kec	6 kec
26			Terlaksananya widya karya petani / penyuluh	-	15 org	15 org	15 org	15 org
27		Kelompok nelayan / masyarakat	Terlaksananya pelatihan manajemen kelompok nelayan	-	40 org	50 org	50 org	50 org
28			Terlaksananya pelatihan keterampilan pengolahan hasil perikanan bagi istri-istri nelayan	-	20 org	30 org	40 org	50 org
29			Tercapainya pembinaan kelompok nelayan perikanan tangkap	-	80 org	90 org	100 org	100 org
30			Terlaksananya penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	-	20 org	30 org	40 org	50 org

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31			Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi masyarakat pembudidaya ikan air tawar	-	40 org	50 org	50 org	50 org
32			Terlaksananya demplot budidaya ikan	-	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit
33			Terlaksananya pelatihan budidaya rumput laut	-	30 org	40 org	50 org	50 org
34			Terlaksananya budidaya rumput laut	-	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit
35			Terlaksananya penyuluhan tentang manfaat hutan mangrove	-	40 org	50 org	50 org	50 org

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program kerja dan kegiatan dan sekaligus sebagai asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang meliputi:

1. Percepatan penganekaragaman pangan dengan pengembangan produk pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis bahan pangan, yang mencakup aspek pengolahan, distribusi dan keamanan pangan masyarakat;
2. Pengembangan pangan lokal, pemanfaatan pekarangan, lumbung pangan dan penanganan rawan pangan;
3. Melaksanakan Evaluasi dan analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan masyarakat;
4. Penataan kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebagai sumber informasi dan klinik agribisnis dan pelatihan penyuluh;
5. Pengembangan metode pembinaan penyuluh dalam rangka penumbuhan kelompok tani dan gapoktan;
6. Pengembangan sistem pembinaan kelompok tani dalam rangka meningkatkan jaringan kerjasama antara petani dan pelaku usaha di bidang pertanian.

4.3.2. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam periode 2012-2016, disusun kebijakan pengembangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Majene, yang meliputi:

1. Penyusunan pola pengembangan pangan lokal, pemanfaatan pekarangan dan pengaman keamanan bahan pangan masyarakat;
2. Penetapan pola pelaksanaan Evaluasi, dan analisis Kebutuhan dan ketersediaan pangan masyarakat;
3. Penataan Tugas Pokok dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dengan pendekatan agribisnis berbasis komoditas;
4. Penetapan metode dan sistem pembinaan kelompok tani dan gapoktan;
5. Penataan sistem dan metode Pembinaan Kelompok tani dalam rangka meningkatkan jaringan kerja sama antara kelompok tani dengan pelaku usaha dalam bidang pertanian;
6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan suatu program yang disusun bersama antara penyuluh dan petani;
7. Pembiayaan penyuluhan pertanian merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, petani, dan swasta.
8. Penempatan satu orang penyuluh pertanian pada setiap desa dalam rangka pengembangan satu desa satu komoditi unggulan.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif akan disajikan dalam Tabel 5.1 pada Lampiran 1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dituangkan dalam Tabel 6.1 pada Lampiran 2.